
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Khoirunnisa Wulandari^{a*}, Yeniwati^b

^{a,b}Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

***Korespondensi:** khoirunnisawulandari30@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

1 Februari 2023

Disetujui:

10 April 2023

Terbit daring:

4 Mei 2023

DOI: -

Sitasi:

Wulandari, Khoirunnisa & Yeniwati. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 77-85.

Abstract

The main objective of this research is to find out how socio-economic conditions affect recipients of the Prosperous Family Card Assistance (KKS) in West Sumatra. This study is using the 2017 Susenas Core data with a sample of 19 districts/cities in West Sumatra Province in 2017. We employ the logistic regression analysis (Logistic Regression) with 2,511 observations to infer the social economic condition of household in determining an household as the KKS recipient. The estimation results shows that there is one variable that has no influence on the Head of the Household who receives the Prosperous Family Card assistance, namely the variable of residence ownership with a probability value of 0.075. While the other three variables, namely education level, occupation, and health insurance, have a significant effect on the head of the household who receives the Prosperous Family Card.

Keywords: Socioeconomic, prosperous family card.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan data Kor Susenas 2017 dengan sampel yang digunakan sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Jenis data Survei Sosial Ekonomi adalah sekunder. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017. Alat analisis yang di gunakan analisis regresi logistik (Logistic Regression), dan jumlah seluruh responden yaitu 2.511 orang. Uji dari hasil penelitian terdapat satu variabel yang tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepala Rumah Tangga penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera yaitu variabel kepemilikan tempat tinggal yang nilai probabilitasnya sebesar 0.075. Sedangkan tiga variabel lainnya yaitu jenjang pendidikan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga penerima Kartu keluarga Sejahtera.

Kata Kunci : Sosial ekonomi, kartu keluarga sejahtera .

Kode Klasifikasi JEL: P36, J16, J13

PENDAHULUAN

Ketika seseorang ataupun sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya agar bisa mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat ialah disebut dengan kemiskinan (Kuncoro, 2004). Sebagian masyarakat yang berada di Sumatera Barat masih kekurangan atas hak dasar mereka yang mana diantaranya adalah kesehatan, pekerjaan, pangan dan kondisi perumahan layak. Akibatnya sebagian masyarakat Sumatera Barat juga masih berada dalam kelompok masyarakat miskin dan tidak sejahtera. Apabila dilihat dari berbagai sisi, kemiskinan memiliki dua sisi yakni kemiskinan relatif dan absolut. Sebenarnya kedua sisi ini merupakan konsep yang mengarah kepada harta beda yang memiliki hubungan dengan standar dari kehidupan keluarga atau suatu individu. Kedua sisi yang dimaksud ini sebenarnya memiliki makna pada letak perbedaan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dimulai dari persebaran pendapatannya. Adapun yang menjadikan perbedaan dua sisi kemiskinan tersebut ialah apabila kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan perbandingan relative tingkat dari kesejahteraan masyarakat di dalam penduduk, sedangkan kemiskinan absolut terteloh pada ukuran yang ditentukan sebelum angka batas kemiskinan.

Kementerian Sosial (KEMENSOS) memperkenalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada April 2016 yang dikirimkan kepada masyarakat melalui PT.POS Indonesia. KKS merupakan salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, dengan memperkenalkan program pengentasan kemiskinan ini menjadi kebijakan pemerintah. Program ini ternyata masuk ke dalam Program Keluarga Produktif bersama dengan Skema Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Bantuan yang diterima masyarakat penerima KKS sebanyak Rp.200.000/bulan. Masyarakat penerima bantuan KKS di lapangan ditemukan bahwa masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan KKS sedangkan bantuan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penulis berasumsi bahwa tidak efektifnya penerimaan KKS ini di kaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Melalui metode analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan bahwa secara keadilan sosial kebijakan ini tidak mencerminkan sebuah konsep kesejahteraan dan bermakna bahwa kebijakan ini juga tidak adil. Karena, keadilan sosial akan bisa dirasakan dan tercapai jika kesejahteraan itu juga bisa dirasakan dan tercapai sebagaimana mestinya. Artinya, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan tersebut tidak tepat sesuai sasaran dan tidak merata. Hal ini bisa dikatakan terjadi karena kesalahan data yang muncul pada saat kartu diluncurkan. Meskipun pihak dari birokrasi desa sudah menyerahkan perbaikan dari data yang terbaru, namun nyatanya yang muncul justru data yang lama. Hal ini pun sebenarnya sudah dilaporkan oleh aparat desa kepada birokrasi pemerintah, namun sayangnya sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai kartu keluarga sejahtera tersebut atau biasa disebut dengan KKS. Kartu ini tidak efektif untuk dilaksanakan, karena tidak tepat sasaran, sehingga berimbas kepada pemanfaatan dan penggunaan dari kartu KKS itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kartu yang sudah tersebar di tangan masyarakat, namun belum bisa digunakan karena kartu yang sebar tersebut masih kosong.

Dengan kedudukan ataupun keadaan yang dijadikan pedoman sosial dan menjadikan seseorang dalam posisi tertentu dan terbentuk dalam struktur sosial masyarakat inilah yang disebut dengan kondisi sosial ekonomi. Pemberian posisi seperti ini yang disertai dengan seperangkat kewajiban dan pemberian hak yang harus dipenuhi oleh pembawa status seperti kondisi tempat tinggal, kesehatan dan juga pendidikan. Artinya, secara sederhananya sosial

ekonomi ini menjadi kedudukan atau bisa dikatakan sebagai posisi seseorang dalam elemen masyarakat yang ditentukan oleh pekerjaan, jenis aktivitas ekonomi ataupun pendapatannya.

TINJAUAN LITERATUR

Kondisi sosial dijelaskan oleh Soekanto dan dikutip oleh Zaenal Arifin pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa penghubung antara status sosial dan cari hidup sehari-hari ditetapkan untuk sebuah kelompok dalam masyarakat/individu. Cara hidup yang sejahtera tersebut sering disebut dengan istilah 'kebudayaan'. Aktivitas ini juga dijelaskan bahwasanya pada semua masyarakat dunia, baik sederhana maupun tidak sederhana memiliki pola interaksi kehidupan sosial sesama individu terkait dengan perbedaan status/tingkatan ataupun status dari segi kuantitas dan juga variasi yang ada.

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, hal ini dengan pertimbangan bahwa pendidikan memiliki manfaat sampai seumur hidup. Dengan bantuan pendidikan yang ditempuh memunculkan sebuah harapan pada seseorang untuk bisa membuka pikirannya untuk bisa menerima hal baru seperti material, teknologi dan juga ide baru serta cara bekerja secara alama untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan kesejahteraan dirinya, serta masyarakat dan sduniannya. Masyarakat berpikir untuk dirinya sendiri dan tanah air. Ketika individu memiliki status sosial ekonomi yang tergolong rendah, biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, akan tetapi syaangnya masyarakat masih belum bisa memahami urgensi dari pendidikan yang ada. Hal ini dilihat dari anggapan masyarakat terkait pendidikan bukan menjadi jaminan seseorang bisa kaya raya dan bisa terhindar dari kemiskinan dan secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa sekolah hanya membuang waktu dan material serta pendidikan saja belum tentu cukup untuk bisa menjadi support system pembangunan lanjutan, karena masih banyak masyarakat yang gagal menyelesaikan pendidikannya.

Selain itu, kesempatan kerja juga terkait erat dengan masalah jaminan sosial. Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena pekerjaan memenuhi semua kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi pencarian orang akan kepuasan dan penghargaan atau pembayaran dalam bentuk barang dan jasa memenuhi kebutuhan esensial mereka. Pekerjaan seseorang mempengaruhi peluang keuangannya karena pekerjaan ini wajib bagi setiap orang karena pekerjaan melibatkan dua aspek, kepuasan fisik dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dari segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berkaitan dengan sisi finansial/dukungan keluarga, tetapi juga pekerja bertindak untuk memperoleh status, agar diterima sebagai bagian dari status sosial ekonomi, asosiasi dan berbagai posisi mereka.

Kesehatan erat kaitannya dengan lingkungan hereditas, perilaku dan pelayanan kesehatan. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur secara fisik, mental dan sosial, tetapi juga kemampuannya untuk berprestasi dalam arti produktif dalam bekerja atau secara ekonomi. Bagi anak-anak dan remaja yang belum mampu bekerja atau belum bekerja (pensiunan) atau dalam usia lanjut.

Demikian pula rumah dengan kondisi tempat tinggal dapat menciptakan taraf sosial ekonomi bagi keluarga yang tinggal di dalamnya. Jika rumah berbeda ukuran dengan kualitas rumah. Rumah besar, permanen, dan milik pribadi dapat menunjukkan status sosial ekonomi yang baik, berbeda dengan rumah kecil, semi permanen, dan kontrakan, yang menunjukkan status sosial ekonomi yang buruk.

METODE PENELITIAN

Dalam peneliti ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen yaitu jenjang pendidikan, bidang pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kondisi tempat tinggal terhadap variabel dependen yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Adapun data yang akan diperoleh dan digunakan sebagai acuan yaitu data sekunder berupa Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

Pada penelitian ini akan dipergunakan model yang dituliskan sebagai berikut :

$$\ln [p/(1-p)] = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merupakan kepala rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah di programkan oleh pemerintah yang menggunakan dummy variable, dimana bernilai 1 jika Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan 0 jika Tidak.

Jenjang Pendidikan (X_1) adalah variabel bebas (independen). Tingkat pendidikan diukur berdasarkan lama sekolah (*years of school*) yang dibutuhkan oleh responden dalam menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan satuan tahun (BPS Sumatera Barat). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana : jika nilainya 1 maka adalah tamatan SD, jika nilainya 2 adalah tamatan SMP, jika nilainya 3 adalah tamatan SMA, jika nilainya 4 adalah tamatan D1 / D2 / D3, jika nilainya 5 adalah D4 / S1, dan jika nilainya 6 adalah tamatan S2 / S3.

Pekerjaan (X_2) adalah jenis pekerjaan yang dimiliki peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1, maka bidang pekerjaan yang dimiliki bekerja pada sektor pertanian, dan 0 jika non pertanian.

Jaminan Kesehatan (X_3) adalah jenis jaminan kesehatan yang dimiliki peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1 maka jaminan kesehatannya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 0 jika (Non PBI, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/kantor, dan Tidak punya).

Kepemilikan Tempat Tinggal (X_4) menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1 maka status kepemilikan tempat tinggalnya kontak/sewa dan 0 jika (milik sendiri, bebas sewa, dinas, dan lainnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Keluarga sejahtera (KKS) merupakan kepala rumah tangga yang berstatus sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah di programkan oleh pemerintah di Sumatera Barat. Untuk mengetahui Kepala Rumah Tangga penerima maupun tidak penerima bantuan KKS tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Jumlah Kepala Rumah Tangga Responden Penerima dan Bukan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Jumlah	Persentase
Penerima KKS	376	14.97
Tidak penerima KKS	2.135	85.02
Total	2.511	100.0

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 1 memiliki 2 status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu yang pertama Kepala Rumah Tangga yang penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan yang kedua yaitu Kepala

Rumah Tangga yang tidak penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) . Dapat terlihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang penerima KKS di Sumatera Barat pada tahun 2017 yaitu berjumlah sebanyak 376 orang dengan persentase 14.97%. Sedangkan jumlah Kepala Rumah Tangga yang tidak penerima KKS yaitu sejumlah 2.135 orang dengan persentase 85.02%.

Tabel 2 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
SD	164	43,62	670	31.39
Lainnya	212	56,39	1.465	68.62
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Jenjang pendidikan adalah urutan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pada Tabel 2 diatas menampilkan jumlah penerima KKS berdasarkan jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 43.62% sedangkan untuk persentase pada tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 56.39%. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan di provinsi Sumatera Barat karena tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga hanya sebatas tamat SD dan sederajat.

Tabel 3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Pekerjaan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sektor Pertanian	240	63.83	1.008	47.22
Non Pertanian	136	36.18	1.127	52.79
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 3 diatas ditampilkan jumlah Kepala Rumah Tangga yang bekerja berdasarkan pekerjaan pada sektor pertanian dan non pertanian. Persentase Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 63.83%. Sedangkan pada sektor non pertanian adalah sebesar 36.18%.

Tabel 4 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jaminan Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jaminan Kesehatan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Penerima Bantuan Iuran (PBI)	300	79.79	535	25.06
Lainnya	76	20.22	1.600	74.95
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang jaminan kekehatannya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu sebesar 300 orang dengan persentase 79.79%.

Tabel 5 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kepemilikan Tempat Tinggal	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Kontrak / Sewa	22	5.86	234	10.97
Lainnya	354	94.15	1.901	89.04
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera menurut kepemilikan tempat tinggal rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggalnya kontrak/sewa adalah berjumlah 22 orang dengan persentase 5.86%. Sedangkan rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah berjumlah 354 orang dengan persentase 94.15%.

Tabel 6 Hasil Pendugaan Parameter dan Odd Ratio Regresi Logistik

Variabel	Coef.	Wald (Z)	Prob.	Odds Ratio	Mfx
Jenjang Pendidikan	0.032	1.53	0.125	1.033	0.002
Pekerjaan	0.550	4.27	0.000	1.733	0.047
Jaminan Kesehatan	2.426	17.40	0.000	11.317	0.299
Kepemilikan Tempat Tinggal	-0.493	-1.97	0.049	0.610	-0.035
Constant	-3.363	-22.45	0.000	0.034	-

Sumber : Data diolah, output STATA 14,2022

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi terhadap 4 variabel bebas yang digunakan ditemukan bahwa 3 variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tiga variabel yang signifikan yaitu pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kepemilikan tempat tinggal. Sementara satu variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan yaitu jenjang pendidikan.

Pengaruh Jenjang Pendidikan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas pertama adalah variabel jenjang pendidikan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.125. Artinya jika nilai P-value lebih besar dari taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_0 dan H_1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara jenjang pendidikan dengan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Variabel jenjang pendidikan ini memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, sebab tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu dari komponen yang penting menyebabkan terjadinya kemiskinan. Peluang untuk mendapatkan Program penerima Kartu keluarga Sejahtera (KKS) dengan tingkat pendidikan tidak pernah sekolah atau SD memiliki peluang 1.03 kali lebih kecil dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai pendidikan lainnya (SMP, SMA, Perguruan Tinggi).

Dengan adanya hasil penelitian ini berarti menunjukkan bahwa jenjang pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peserta penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Semakin rendah pendidikan maka peluang menerima program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat. Peserta penerima KKS dengan tingkat

pendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan dan keahlian yang baik, peluang untuk mendapat pekerjaan atau membuka usaha lebih besar, sehingga mereka tidak akan masuk kedalam kategori penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pengaruh Pekerjaan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas kedua adalah variabel pekerjaan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value 0.000. Maka artinya jika nilai P-value kecil dari taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_a dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara pekerjaan dengan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Pekerjaan merupakan aktivitas sesama manusia untuk saling melengkapi sekaligus memenuhi suatu kebutuhan dengan tujuan tertentu. Peluang untuk mendapatkan KKS dengan pekerjaan sektor pertanian mempunyai peluang 1.73 kali lebih besar dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai jenis pekerjaan sektor non pertanian.

Hasil analisis ini menggambarkan bahwa terjadinya transformasi atau biasa dikatakan dengan suatu perubahan pada nilai pekerjaan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jenis pekerjaan di sektor pertanian maka peluang menerima Program penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan penghasilan rumah tangga di sektor pertanian cenderung tidak tetap. Sedangkan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki jenis pekerjaan di sektor non pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka tidak akan masuk kedalam kategori Penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pengaruh Jaminan Kesehatan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel ketiga adalah variabel jaminan kesehatan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value 0.000. Maka artinya jika nilai P-value kecil dari taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_a dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara jaminan kesehatan dengan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Peluang untuk mendapatkan KKS dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mempunyai peluang 11.31 kali lebih besar dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan pada nilai jaminan kesehatan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka peluang menerima Program penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat.

Pengaruh Kepemilikan Tempat Tinggal Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas yang keempat adalah kepemilikan tempat tinggal, dimana berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.049. Artinya jika nilai P-value lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_a dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara kepemilikan tempat tinggal dengan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Tempat tinggal merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk berlindung suatu individu atau keluarga sehingga merasa aman dan nyaman di dalamnya. Kepemilikan tempat

tinggal dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika suatu rumah tangga mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa atau kontrak rumah. Namun jika rumah tangga tersebut tidak mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya kontrak atau sewa yang menambah beban pengeluaran rumah tangga tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nilai kepemilikan tempat tinggal akan memberikan kontribusi yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga penerima KKS, dimana jika kepala rumah tangga tidak mempunyai rumah sendiri maka akan meningkatkan jumlah penerima KKS, sebaliknya apabila kepala rumah tangga mempunyai rumah sendiri maka akan menurunkan kemungkinan kepala rumah tangga untuk menerima Kartu Keluarga Sejahtera.

SIMPULAN

Jenjang Pendidikan (X_1) memiliki hubungan baik dan tidak terlalu berpengaruh atau disebut dengan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga mempunyai jenjang pendidikan tertinggi adalah SD dan sederajat, maka semakin signifikan rumah tangga tersebut menerima program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian, maka semakin banyak rumah tangga tersebut menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitupula sebaliknya. Jaminan Kesehatan (X_3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka semakin signifikan rumah tangga tersebut menerima program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitu pula sebaliknya. Kepemilikan Tempat Tinggal (X_4) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerima program Kartu Keluarga Sejahtera di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga memiliki tempat tinggal kontrak/sewa, maka pada variabel ini kepala rumah tangga berpengaruh signifikan untuk menerima KKS, Begitupula sebaliknya. Secara bersama – sama variabel jenjang pendidikan (X_1), pekerjaan (X_2), jaminan kesehatan (X_3), dan kepemilikan tempat tinggal (X_4), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerima Kartu keluarga sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf signifikansi 5%.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.
- Badan Pusat Statistik, (2005) Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005.
- _____, (2009) „Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2009.“Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th.XII. July 2009.
- _____,(2017). Survei Sosial ekonomi. Sumatera Barat : Badan Pusat Statistik.
- Boediono. 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
- Coleman dan, C. (2004). Klasifikasi Status Sosial. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/318288073_Pengaruh_Status_Sosial_dan_Kondisi_Ekonomi_Keluarga_terhadap_Motivasi_Bekerja_bagi_Remaja_Awal_Usia_1216_Tahun_di_Kabupaten_Ponorogo
- Framita, D. Y. (2017). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta
- Jombang-Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 4(1), 461–469.

- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, 7(1).
- Kartono. (1991 : 21). Pengertian Pekerjaan ditinjau dari segi sosial. Diambil kembali dari http://eprints.uny.ac.id/40851/1/Skripsi_DamarPutra_12601241029_PJKR.pdf
- Kuncoro, Murdrajat. 2006. "Ekonomi Pembangunan", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2012, Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA. *PILAR*, 11(2), 1-14.
- Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 3(1), 1-10.
- Mulyanto. (1985 : 2). Pengaruh Faktor Pekerjaan dalam Status Sosial Ekonomi Masyarakat . Diambil kembali dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/600/6/10410177%20Bab%202.pdf>
- Ngadiyono. (1986 : 46). 3 Macam Pendidikan berdasarkan Isi dan Program dan Penyelenggaraan. Diambil kembali dari [coursehero:https://www.coursehero.com/file/p3gmn5el/2-Pekerjaan-yang-menunjukkan-status-sosial-ekonomi-sedang-adalah-pensiunan-PNS/](https://www.coursehero.com/file/p3gmn5el/2-Pekerjaan-yang-menunjukkan-status-sosial-ekonomi-sedang-adalah-pensiunan-PNS/)
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. Kementian Sosial. Program Kartu Keluarga Sejahtera.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
- Soekanto, M. (2007 : 207). Status dan Peran Sosial. Diambil kembali dari [Jendela Ilmu:http://wahyusofyanto55.blogspot.com/2015/08/status-dan-peran-sosial.html](http://wahyusofyanto55.blogspot.com/2015/08/status-dan-peran-sosial.html)
- Soeroto. (1986 : 167). Penjelasan mengenai Pekerjaan menurut Pendapat Soeroto. Diambil kembali dari [The Blog Shifty:https://blog.ub.ac.id/agrodan/?p=59](https://blog.ub.ac.id/agrodan/?p=59)
- Suhendra, M. A., Ispriyanti, D., & Sudarno, S. (2020). Ketepatan Klasifikasi Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Semarang Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner Dan Metode Chaid. *Jurnal Gaussian*, 9(1), 64-74.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- World Bank Institute. 2008. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*.
- World Bank Institute.
- Yuliawati, D. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw). *Jurnal Teknologi Informasi Magister*, 1(02), 203-217.